



Dinamika Institusional dalam Diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap Uni Emirat Arab Periode 2019-2024

Khairan Nurfikri¹, Briandhana Kusaditya Krisnatirta², Deasy Silvyia Sari³, Dina Yulianti⁴

¹Universitas Padjadjaran, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia, khairan22001@mail.unpad.ac.id

²Universitas Padjadjaran, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia, briandhana22001@mail.unpad.ac.id

³Universitas Padjadjaran, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia, deasy.silvyia@unpad.ac.id

⁴Universitas Padjadjaran, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia, dina.yulianti@unpad.ac.id

Abstract: *This study examines the institutional dynamics of Indonesia's economic diplomacy toward the United Arab Emirates (UAE) during 2019–2024 through three main instruments: the Indonesia–UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA), the transformation of the Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) Dubai, and the sovereign wealth fund (SWF) partnership between Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) and Indonesia Investment Authority (INA). Using a qualitative instrumental case study approach, this research analyzes approximately 35 primary and secondary documents collected during 2024–2025, including bilateral agreements, government reports, and international publications. The findings show a shift from transactional engagement toward more institutionalized economic cooperation. Following the implementation of IUAE-CEPA, Indonesia's exports to the UAE increased by 20.1% during January–August 2024, while trade liberalization covered around 94% of bilateral tariff lines. The study also finds that ITPC Dubai strengthened export facilitation and market promotion, while INA–UEA investment cooperation expanded long-term infrastructure partnerships. However, implementation gaps remain, particularly in investment realization, inter-agency coordination, and post-agreement monitoring. The study concludes that Indonesia's economic diplomacy toward the UAE increasingly relies on institutional mechanisms to sustain bilateral economic cooperation.*

Keywords: *economic diplomacy, neoliberal institutionalism, sovereign wealth fund, IUAE-CEPA, South-South cooperation.*

Abstrak: Studi ini menganalisis dinamika institusional dalam diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Uni Emirat Arab (UEA) periode 2019–2024 melalui tiga instrumen utama, yaitu Indonesia–UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA), transformasi fungsi Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) Dubai, serta kemitraan sovereign wealth fund (SWF) antara Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) dan Indonesia Investment Authority (INA). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis instrumental case study dengan menganalisis sekitar 35 dokumen primer dan sekunder yang dikumpulkan selama 2024–2025, mencakup perjanjian bilateral, laporan pemerintah, dan publikasi internasional. Temuan menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan transaksional menuju kerja sama ekonomi yang lebih terinstitusionalisasi. Pasca-

implementasi IUAE-CEPA, ekspor Indonesia ke UEA meningkat sebesar 20,1% pada periode Januari–Agustus 2024, sementara liberalisasi perdagangan mencakup sekitar 94% pos tarif bilateral. Penelitian juga menemukan bahwa ITPC Dubai memperkuat fasilitasi ekspor dan promosi pasar, sedangkan kerja sama investasi INA–UEA memperluas kemitraan infrastruktur jangka panjang. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan implementasi, terutama terkait realisasi investasi, koordinasi antarlembaga, dan mekanisme pemantauan pasca-perjanjian. Studi ini menyimpulkan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia terhadap UEA semakin bertumpu pada penguatan mekanisme kelembagaan untuk menjaga keberlanjutan kerja sama bilateral.

Kata Kunci: IUAE-CEPA, diplomasi ekonomi, institusionalisme neoliberal, *foreign direct investment*, kerja sama Selatan-Selatan

PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, dinamika ekonomi global telah memperlihatkan kemunculan kawasan *Global South* sebagai pusat pertumbuhan baru yang menjanjikan. Kawasan Timur Tengah, khususnya negara-negara Teluk seperti Uni Emirat Arab (UEA), mencatat pertumbuhan tahunan rata-rata di atas 4%, yang turut menjadikannya mitra potensial dalam tatanan ekonomi dunia yang kian multipolar (World Bank, 2023). Di sisi lain, Indonesia sebagai negara berkembang dengan posisi strategis di Asia Tenggara masih mempertahankan ketergantungan yang tinggi terhadap mitra dagang tradisional seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura (UNCTAD, 2022). Ketergantungan ini menimbulkan risiko struktural yang signifikan, terutama ketika terjadi disrupsi global seperti pandemi, krisis logistik, atau ketegangan geopolitik, yang pada akhirnya berdampak langsung pada stabilitas ekonomi domestik (Badan Pusat Statistik, 2022).

Dalam menghadapi permasalahan ini, Pemerintah Indonesia, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada periode keduanya (2019-2024), menginisiasi pendekatan baru dalam diplomasi luar negeri dengan menempatkan diplomasi ekonomi sebagai prioritas strategis utama. Kebijakan ini diperkuat oleh Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 yang mengarahkan agar lebih dari 70% aktivitas misi diplomatik Indonesia diarahkan pada peningkatan ekspor, promosi investasi, dan penguatan kerja sama ekonomi lintas kawasan (Kementerian Luar Negeri RI, 2021).

Langkah ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan normatif-politik menuju diplomasi berbasis hasil ekonomi. Sebagai manifestasi konkret, Indonesia menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi *Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IUAE-CEPA) dengan UEA pada Juli 2022 yang mulai berlaku efektif sejak September 2023. Perjanjian ini menjadi tonggak penting karena mencakup liberalisasi tarif atas lebih dari 94% nilai perdagangan bilateral dan menciptakan peluang akses preferensial dalam pengadaan publik sebesar 10% (UAE Ministry of Economy, 2022).

Namun, efektivitas dari perjanjian ini sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan dan instrumen operasional di lapangan. Salah satu bentuk aktualisasi kebijakan tersebut adalah revitalisasi fungsi *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC) di Dubai. Lembaga ini mengalami transformasi dari sekadar institusi promosi konvensional menjadi simpul informasi pasar strategis melalui *digital matchmaking*, pemetaan permintaan produk potensial, dan pemberdayaan eksportir Indonesia, khususnya pelaku UMKM. Secara paralel, diplomasi ekonomi Indonesia juga difasilitasi oleh pembentukan kemitraan strategis antara *Abu Dhabi Investment Authority* (ADIA) sebagai *sovereign wealth fund* dari UEA dan *Indonesia Investment Authority* (INA) yang berperan sebagai mitra penerima dan pengelola investasi jangka panjang (BKPM, 2023). Model kerja sama ini tidak hanya mencerminkan diplomasi

ekonomi dalam dimensi investasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan pembangunan infrastruktur nasional.

Kendati kebijakan ini telah menunjukkan berbagai kemajuan dalam aspek formal dan normatif, realisasi di lapangan masih menyisakan kekhawatiran yang patut dicermati. Meskipun perjanjian perdagangan telah diteken dan disambut pernyataan politik yang antusias, capaian operasional justru belum sepenuhnya mencerminkan potensi yang dijanjikan. Pada 2023, nilai ekspor nonmigas Indonesia ke UEA tercatat sebesar US\$2,65 miliar, hanya 4,3% dari total ekspor nonmigas nasional. Angka ini tampak kontras ketika dibandingkan dengan nilai perdagangan UEA-Tiongkok yang mencapai lebih dari US\$72 miliar atau UEA-India sebesar US\$30 miliar (WAM, 2023). Perbedaan mencolok ini menggambarkan sejauh mana Indonesia belum optimal dalam membangun daya saing dan citra pasar yang kuat di Timur Tengah.

Lebih lanjut, implementasi *Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IUAE-CEPA) menunjukkan adanya antusiasme awal, tetapi belum sepenuhnya dibarengi dengan kesiapan teknis dan kelembagaan. Meski 94% pos tarif telah diliberalisasi sejak perjanjian diberlakukan pada September 2023, pertumbuhan volume perdagangan hanya meningkat 15% *year-on-year* (Katadata, 2025). Di balik angka tersebut, masih tersembunyi masalah-masalah seperti, logistik yang belum efisien, perbedaan regulasi standar halal, dan ketidakpastian mata uang yang mengganggu stabilitas harga ekspor. Hal-hal teknis ini justru kerap menjadi penghalang nyata dalam praktik sehari-hari eksportir.

Sementara itu, di ranah investasi, komitmen UEA untuk menanamkan dana sebesar US\$10 miliar ke Indonesia melalui *Indonesia Investment Authority* (INA) yang diumumkan pada April 2021 sempat menimbulkan optimisme besar. Namun realisasi dana yang tercatat hanya sebesar US\$0,2 juta pada kuartal pertama 2021 (Baqi, 2022) menunjukkan bahwa janji politik tidak serta-merta menjelma menjadi arus modal riil. Kesenjangan ini muncul dari kurangnya kerangka komunikasi lintas lembaga yang sistemik, absennya sistem pemantauan investasi yang responsif, serta kelemahan dalam menyusun prioritas proyek yang menarik bagi investor jangka panjang.

Berdasarkan fenomena ini, peneliti telah menyertakan penelitian-penelitian terdahulu sebagai acuan dan perbandingan, sehingga dapat diidentifikasi perbedaannya dan dapat dicapai pula kebaruan dari penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu tersebut:

Yanti (2023) mencatat bahwa diplomasi ekonomi Indonesia dengan UEA mengalami akselerasi substansial setelah rangkaian kunjungan kenegaraan tingkat tinggi yang berpuncak pada penandatanganan IUAE-CEPA. Dalam penelitiannya, Yanti menyoroti bahwa kebijakan tersebut berhasil membuka akses pasar baru untuk produk pertanian, makanan olahan, dan tekstil Indonesia. Selain itu, ia juga mencatat adanya peningkatan kerja sama ekonomi syariah yang difasilitasi oleh pendekatan diplomasi berbasis nilai bersama antara kedua negara.

Sementara itu, Baqi (2022) menawarkan perspektif yang berbeda dengan menyoroti aspek investasi, khususnya melalui kemitraan antara Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) dan Indonesia Investment Authority (INA). Ia menekankan bahwa kalkulasi geopolitik dan strategi diplomasi ekonomi UEA menjadi determinan utama dalam arah investasi mereka, terutama untuk memperkuat eksistensi di Asia Tenggara. Penelitian ini memperlihatkan bahwa tanpa tata kelola investasi yang kredibel dan sistem koordinasi antar lembaga yang terintegrasi, kemitraan strategis berisiko tidak optimal.

Terakhir, Minhajuddin dkk. (2023) memperdalam diskursus tentang kontribusi CEPA terhadap sektor ekonomi berbasis nilai, khususnya industri halal. Penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama bilateral Indonesia-UEA membuka jalan bagi penetrasi pasar produk halal Indonesia, termasuk kosmetik, farmasi, dan makanan. Namun, mereka juga menekankan pentingnya harmonisasi standar halal dan pengakuan sertifikasi lintas negara sebagai prasyarat agar manfaat ekonomi dari CEPA dapat direalisasikan secara maksimal dan berkelanjutan.

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dari beberapa penelitian terdahulu, karena meskipun telah banyak literatur yang membahas mengenai diplomasi ekonomi Indonesia, kajian yang secara khusus menelaah dinamika institusional dan operasionalisasi kebijakan strategis dalam hubungan bilateral Indonesia-UEA secara menyeluruh masih relatif terbatas. Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan mengintegrasikan tiga instrumen utama; IUAE-CEPA, transformasi ITPC Dubai, dan kemitraan SWF UEA-INA, ke dalam satu kerangka analisis institusional yang komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam menjelaskan fenomena diplomasi ekonomi berbasis kelembagaan di antara dua negara *Global South* yang memiliki kepentingan ekonomi saling melengkapi. Berdasarkan uraian tersebut, Atas dasar itu, penelitian ini berjudul, **“Dinamika Institusional Diplomasi Ekonomi Indonesia-UEA Periode 2019-2024”**.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diajukan adalah, **“Bagaimana implementasi strategi dan kebijakan diplomasi ekonomi Indonesia melalui IUAE-CEPA, transformasi fungsi ITPC Dubai, dan kemitraan SWF UEA-INA, dalam memperkuat hubungan ekonomi bilateral dengan Uni Emirat Arab pada periode 2019-2024?”**

Maksud penelitian ini yaitu untuk memahami sejauh mana Indonesia mengimplementasikan strategi dan kebijakan diplomasi ekonominya melalui 3 instrumen tersebut dalam hubungan bilateral dengan Uni Emirat Arab. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses negosiasi dan implementasi diplomasi ekonomi Indonesia melalui perjanjian IUAE-CEPA pada periode 2019-2024.
2. Untuk mengidentifikasi perubahan dan perkembangan fungsi ITPC Dubai dalam konteks pelaksanaan strategi promosi perdagangan pasca-CEPA.
3. Untuk menganalisis skema kemitraan investasi antara *sovereign wealth fund* UEA (ADIA) dan Indonesia (INA) serta implikasinya terhadap pembangunan infrastruktur nasional.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur ilmiah mengenai diplomasi ekonomi Indonesia, khususnya dalam konteks hubungan bilateral dengan Uni Emirat Arab. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan studi hubungan internasional mengenai diplomasi ekonomi *Global South* dengan memanfaatkan perspektif institusional dalam menjelaskan koordinasi, aturan, dan insentif kerja sama (Bayne & Woolcock, 2011).

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi wawasan bagi pemangku kepentingan terkait, termasuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, BKPM, dan INA, serta mendukung perumusan strategi promosi ekspor, penguatan *market intelligence*, dan peningkatan posisi tawar Indonesia di pasar Timur Tengah, khususnya UEA.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *instrumental case study* untuk menganalisis dinamika institusional diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Uni Emirat Arab (UEA) pada periode 2019–2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada proses institusionalisasi, mekanisme koordinasi antarlembaga, serta implementasi kebijakan diplomasi ekonomi yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan kuantitatif. Sementara itu, desain *instrumental case study* digunakan karena kasus Indonesia–UEA diposisikan sebagai instrumen untuk memahami fenomena yang lebih luas, yakni penguatan diplomasi ekonomi berbasis kelembagaan dalam konteks kerja sama negara-negara *Global South* (Creswell & Poth, 2018). Penelitian ini memfokuskan analisis pada tiga instrumen utama, yaitu *Indonesia–United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IUAE-CEPA), transformasi fungsi *Indonesia Trade Promotion Center* (ITPC) Dubai, serta kemitraan *sovereign wealth fund* antara *Abu Dhabi Investment Authority* (ADIA) dan *Indonesia Investment Authority* (INA).

Data penelitian bersifat sekunder dan dikumpulkan melalui teknik *document analysis*. Sumber data primer mencakup dokumen resmi pemerintah Indonesia dan UEA, Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2023 tentang ratifikasi IUAE-CEPA, laporan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, publikasi INA, dokumen perdagangan bilateral, serta laporan lembaga internasional yang relevan. Adapun sumber data sekunder terdiri atas artikel jurnal akademik, buku, laporan *think tank*, dan publikasi media yang berkaitan dengan diplomasi ekonomi Indonesia–UEA. Dokumen dipilih berdasarkan relevansi substansial terhadap proses negosiasi, implementasi kebijakan, penguatan kelembagaan, dan dinamika investasi bilateral selama periode penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles et al., 2014). Data kemudian dianalisis secara tematik dengan memfokuskan penelusuran pada beberapa kategori utama, yaitu mekanisme koordinasi kelembagaan, implementasi kerja sama ekonomi, fasilitasi perdagangan, serta tata kelola investasi strategis. Dalam proses analisis, kerangka institusionalisme neoliberal digunakan sebagai alat analisis untuk memahami bagaimana institusi, aturan, dan mekanisme koordinasi memengaruhi efektivitas kerja sama ekonomi bilateral antara Indonesia dan UEA (Keohane, 1984).

Untuk meningkatkan kredibilitas penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber melalui perbandingan lintas dokumen pemerintah, lembaga internasional, literatur akademik, dan media. Selain itu, penelitian juga menerapkan *cross-document verification* guna memastikan konsistensi informasi terkait implementasi IUAE-CEPA, transformasi fungsi ITPC Dubai, dan realisasi kerja sama investasi antara INA dan mitra UEA. Pendekatan ini dilakukan untuk meminimalkan bias interpretasi serta memperkuat konsistensi dan validitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Negosiasi dan Implementasi IUAE-CEPA

Penandatanganan *Indonesia–UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IUAE-CEPA) pada 1 Juli 2022 menandai transformasi struktural dalam arsitektur diplomasi ekonomi Indonesia di kawasan Timur Tengah. Dalam perspektif institusionalisme neoliberal, perjanjian ini tidak dapat dipahami semata sebagai instrumen liberalisasi tarif bilateral. Lebih dari itu, IUAE-CEPA merupakan kerangka institusional formal yang dirancang untuk mengurangi *uncertainty*, menurunkan *transaction costs*, dan menciptakan *credible commitment* yang mengikat kedua negara dalam kerangka kerja sama jangka panjang (Keohane, 1984). Proses negosiasi diselesaikan dalam empat putaran formal—di Bogor, Dubai, Semarang, dan Yogyakarta—dalam rentang waktu kurang dari 16 bulan (Maret 2021–Juli 2022), suatu kecepatan yang melampaui rata-rata negosiasi CEPA Indonesia dengan mitra lainnya (Kementerian Perdagangan RI, 2022). Sebagai pembanding, *Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) memerlukan lebih dari tujuh tahun sebelum ditandatangani pada 2019. Kecepatan negosiasi IUAE-CEPA mengindikasikan adanya *pre-existing convergence of interests* yang kuat antara kedua negara—suatu kondisi di mana institusi berfungsi bukan untuk membangun kepentingan dari nol, melainkan untuk memformalkan dan mengunci komitmen yang telah terbentuk sebelumnya.

Ratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2023 dan pemberlakuan efektif pada 1 September 2023 melengkapai siklus institusionalisasi awal CEPA (Kementerian Luar Negeri RI, 2023). Dari sudut pandang teori Keohane (1984), ratifikasi hukum domestik ini berfungsi sebagai mekanisme *lock-in commitment*: ia meningkatkan biaya politik dari setiap kemungkinan pembalikan kebijakan, sehingga secara struktural memperkuat kepercayaan mitra dagang dan investor asing terhadap stabilitas kerangka kerja sama. Dalam konteks ini, CEPA beroperasi tidak hanya sebagai perjanjian perdagangan, tetapi sebagai

institutional signal yang mengomunikasikan keseriusan Indonesia untuk membangun hubungan ekonomi jangka panjang dengan UEA.

1. Cakupan Substantif dan Implikasi Institusional

IUAE-CEPA mengoperasionalkan empat pilar utama-perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, dan ekonomi Islam-yang secara kolektif membentuk apa yang Bayne dan Woolcock (2011) sebut sebagai *comprehensive economic diplomacy architecture*: suatu kerangka yang melampaui sekadar pengurangan tarif dan menyentuh dimensi regulasi, standar, serta mekanisme koordinasi lintas sektoral. Dalam hal perdagangan barang, UEA berkomitmen mengeliminasi atau menurunkan tarif pada lebih dari 90% *tariff lines*, yang mencakup 94% nilai perdagangan bilateral-membuka akses pasar signifikan bagi komoditas strategis Indonesia termasuk minyak sawit, tekstil, perhiasan, dan kendaraan bermotor (WTO, 2023; Ministry of Economy UAE, 2024). Penghapusan tarif ini menciptakan *locked-in incentive structure* yang meningkatkan daya saing ekspor Indonesia secara otomatis dan memperbesar biaya politis dari setiap kemungkinan renegotiasi sepihak.

Dimensi paling inovatif dari IUAE-CEPA adalah integrasi bab khusus Ekonomi Islam, yang mencakup mekanisme *mutual recognition* atas sertifikasi halal serta kerja sama di tujuh subsektor industri halal, meliputi makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, busana muslim, pariwisata, media dan rekreasi, serta keuangan syariah (Minhajuddin et al., 2023). Secara institusional, mekanisme *mutual recognition* ini mengeliminasi duplikasi biaya sertifikasi bagi eksportir Indonesia-suatu pengurangan langsung atas *transaction costs* yang konkret dirasakan pelaku usaha, khususnya segmen UMKM. Liberalisasi sektor jasa dengan izin kepemilikan asing hingga 75% di sektor konstruksi, kesehatan, dan jasa profesional (Ministry of Economy UAE, 2024) menambah dimensi pengurangan *information asymmetry* regulasi yang selama ini menghambat arus investasi lintas batas. Meski demikian, komitmen de jure tersebut tidak secara otomatis menghasilkan arus perdagangan dan investasi de facto; yakni kesenjangan implementasi antara liberalisasi formal dan pemanfaatan aktual tetap menjadi tantangan struktural yang memerlukan mekanisme pengawasan berkelanjutan.

Gambaran tentang dampak awal liberalisasi perdagangan ini dapat dilihat dari data perdagangan bilateral yang tercantum pada Tabel 1 berikut. Data tersebut menunjukkan trajektori peningkatan yang relevan sebagai indikasi awal efektivitas CEPA, meskipun analisis kausalitas yang lebih ketat masih memerlukan data sektoral jangka menengah.

Tabel 1. Tren Perdagangan Indonesia–UEA Pra dan Pasca Implementasi IUAE-CEPA

Indikator	Nilai / Temuan	Periode	Implikasi
Total perdagangan Indonesia–UEA	US\$5,05 miliar	2024	Menunjukkan peningkatan intensitas hubungan ekonomi bilateral pasca-implementasi CEPA
Ekspor Indonesia ke UEA	US\$3,06 miliar	2024	Mengindikasikan penguatan akses pasar ekspor Indonesia di kawasan Teluk
Surplus perdagangan Indonesia	US\$1,07 miliar	2024	Memperlihatkan posisi perdagangan bilateral yang relatif menguntungkan bagi Indonesia
Pertumbuhan ekspor pasca-CEPA	Naik 20,1% menjadi US\$1,98 miliar	Jan–Ags 2024	Mengindikasikan dampak awal liberalisasi perdagangan melalui CEPA

Indikator	Nilai / Temuan	Periode	Implikasi
Kenaikan surplus perdagangan	Naik 380% dari US\$147,9 juta menjadi US\$710 juta	Jan–Ags 2023-2024	Menunjukkan potensi pengurangan hambatan perdagangan dan peningkatan akses pasar
Target perdagangan nonmigas bilateral	US\$10 miliar per tahun	Proyeksi pasca-CEPA	Merefleksikan ekspektasi institusional terhadap kerja sama perdagangan jangka panjang

Sumber: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2024); Jakarta Daily (2025); Bisnis.com (2024). Data perdagangan Januari–Agustus 2024 bersifat awal dan akan diperbarui seiring tersedianya data tahunan penuh dari BPS dan UN Comtrade.

Tabel 1 menunjukkan bahwa dalam periode segera setelah implementasi CEPA (September 2023), terdapat lonjakan surplus perdagangan yang substansial, yakni sebesar 380% pada periode Januari–Agustus 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Kementerian Perdagangan RI, 2024). Peningkatan ini konsisten dengan prediksi teoritis institusionalisme neoliberal bahwa formalisasi komitmen melalui perjanjian yang mengikat akan menggerakkan pelaku usaha untuk mengoptimalkan insentif yang tersedia dalam hal ini, tarif preferensial dan akses pasar yang telah dijamin secara hukum. Namun, mengingat singkatnya periode observasi, perlu kehati-hatian dalam menafsirkan tren ini sebagai bukti kausalitas langsung CEPA terhadap peningkatan perdagangan, mengingat faktor eksternal seperti pemulihan ekonomi global pasca-pandemi dan dinamika harga komoditas turut berperan.

Diversifikasi komoditas ekspor merupakan dimensi empiris yang juga relevan untuk diperhatikan. Tabel 2 menyajikan perkembangan tiga komoditas utama ekspor Indonesia ke UEA berdasarkan klasifikasi HS, yang mencerminkan pergeseran struktural dalam komposisi ekspor bilateral.

Tabel 2. Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia ke UEA Berdasarkan Nilai Ekspor (2021–2023)

Kode HS	Komoditas Utama	2021	2022	2023	Tren 2022–2023	Interpretasi
HS15	Lemak dan minyak nabati (termasuk sawit)	US\$295 juta	US\$292 juta	US\$255 juta	-14,5%	Volatilitas permintaan komoditas primer; rentan terhadap fluktuasi harga global
HS71	Logam mulia dan perhiasan	US\$281 juta	US\$364 juta	US\$589 juta	+62,2%	Peningkatan signifikan; mengindikasikan integrasi sektor bernilai tambah tinggi
HS87	Kendaraan dan bagiannya	US\$175 juta	US\$282 juta	US\$382 juta	+35,4%	Ekspansi ekspor manufaktur; mencerminkan daya saing industri otomotif Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) sebagaimana dikutip dalam Rifqi & Putri (2024); International Trade Centre (2024).

Tabel 2 menunjukkan pola yang penting secara analitis, sementara ekspor minyak sawit dan lemak nabati (HS15) mengalami penurunan sebesar 14,5% pada periode 2022–2023-mencerminkan volatilitas yang melekat pada komoditas primer-ekspor perhiasan (HS71) justru melonjak 62,2% dan ekspor kendaraan serta komponennya (HS87) tumbuh 35,4%. Pergeseran ini mengindikasikan bahwa diversifikasi ekspor Indonesia ke UEA tidak sekadar terjadi dalam ranah komoditas, melainkan mulai bergerak ke arah produk manufaktur bernilai tambah lebih tinggi. Dalam kerangka institusionalisme neoliberal, temuan ini relevan karena liberalisasi tarif CEPA untuk sektor-sektor ini menciptakan insentif struktural yang mendorong eksportir Indonesia untuk menggeser sumber daya menuju segmen pasar yang kini lebih kompetitif secara harga di UEA. Lonjakan perhiasan khususnya selaras dengan laporan ITPC Dubai mengenai meningkatnya aktivitas bisnis di sektor ini pasca-berlakunya CEPA (Katadata, 2024).

1.2 Mekanisme Pengawasan Pasca-Ratifikasi

Karakteristik institusional IUAE-CEPA tidak hanya terletak pada cakupan liberalisasinya, tetapi juga pada mekanisme pengawasan yang dirancang untuk menjamin keberlanjutan implementasi. Sebagaimana tampak pada Tabel 3, CEPA dilengkapi dengan arsitektur monitoring berlapis yang mencerminkan komitmen kedua pihak terhadap *institutional governance* jangka panjang.

Tabel 3. Karakteristik Institusional IUAE-CEPA dan Mekanisme Implementasi

Aspek Institusional	Temuan	Fungsi dalam Perspektif Neoliberal
Penandatanganan perjanjian	1 Juli 2022, Abu Dhabi	Formalisasi komitmen bilateral; mekanisme pengunci
Berlaku efektif	1 September 2023 (Perpres No. 43/2023)	Dasar hukum implementasi; meningkatkan kredibilitas komitmen
Cakupan liberalisasi tarif	>90% tariff lines; 94% nilai perdagangan	Mengurangi transaction costs; menciptakan locked-in incentive structure
Pilar utama	Barang, jasa, investasi, ekonomi Islam	Memperluas institutional framework melampaui perdagangan konvensional
Joint Committee	Dibentuk sebagai badan evaluasi implementasi	Facilitates institutional coordination; mengurangi risiko implementation gap
Sub-komite sektoral	Perdagangan barang, jasa, investasi, ekonomi Islam	Nested institutions untuk penyelesaian isu teknis di level yang sesuai
Mutual recognition halal	Pengakuan bersama sertifikasi halal; 7 subsektor	Mengurangi information asymmetry dan transaction costs bagi UMKM eksportir

Sumber: Ministry of Economy UAE (2024); Kementerian Perdagangan RI (2024); WTO RTA Database (2023).

Pembentukan *Joint Committee* sebagai badan pengawas implementasi merupakan investasi dalam *institutional capital* yang berfungsi mencegah pelemahan komitmen dan

memfasilitasi adaptasi perjanjian terhadap perubahan kondisi ekonomi (Keohane, 1984). Struktur *nested institutions* yang terdiri dari komite utama dan sub-komite sektoral memungkinkan penanganan isu-isu teknis-seperti *rules of origin*, *tariff rate quotas* (TRQ), dan sengketa sertifikasi-di tingkat yang sesuai tanpa membebani forum diplomatik tingkat tinggi (Kementerian Perdagangan RI, 2024). Meski demikian, laporan mengenai penundaan Pertemuan *Joint Committee* pertama yang semula dijadwalkan pada September 2023 mengindikasikan adanya hambatan koordinasi awal yang perlu mendapat perhatian. Keterlambatan semacam ini, jika bersifat sistemik, berisiko menciptakan *institutional inertia* yang melemahkan kepercayaan pelaku usaha terhadap efektivitas mekanisme monitoring dan, pada akhirnya, mengurangi *credibility* komitmen implementasi di mata investor (Bayne & Woolcock, 2011). Oleh karena itu, evaluasi efektivitas IUAE-CEPA dalam jangka menengah perlu memperhatikan tidak hanya tren perdagangan yang dihasilkan, tetapi juga kualitas dan frekuensi sidang *Joint Committee* sebagai indikator kesehatan institusional perjanjian.

2. Transformasi Fungsi ITPC Dubai: Dari Fasilitator Administratif Menuju Katalisator Institusional

Analisis terhadap transformasi *Indonesia Trade Promotion Center* (ITPC) Dubai pasca-IUAE-CEPA mengungkap sebuah dinamika institusional yang lebih kompleks dari sekadar peningkatan intensitas promosi ekspor. Dalam kerangka institusionalisme neoliberal, ITPC berperan sebagai aktor yang menjembatani kesenjangan informasi antara produsen Indonesia dan pasar UEA, sekaligus mengurangi *transaction costs* yang dihadapi eksportir-terutama UMKM-dalam mengakses pasar asing yang memiliki standar dan regulasi berbeda (Pigman, 2010). Transformasi pasca-CEPA bukan berarti perubahan mendasar dalam mandat kelembagaan ITPC, melainkan reorientasi strategis: dari promosi ekspor yang bersifat generik menuju ekspansi pasar yang ditargetkan berdasarkan insentif tarif spesifik yang telah dikunci dalam CEPA.

2.1 Promosi Sektor Unggulan dan Fasilitasi Halal

Aktivasi insentif tarif CEPA menciptakan kondisi struktural yang memungkinkan ITPC mengalokasikan sumber dayanya secara lebih terarah pada sektor-sektor dengan keunggulan komparatif tertinggi. Setelah CEPA berlaku efektif pada September 2023, ITPC Dubai mengintensifkan kegiatan promosi di sektor perhiasan emas, otomotif, tekstil dan busana muslim, serta produk halal lainnya-sektor-sektor yang secara langsung mendapatkan manfaat dari eliminasi atau penurunan tarif UEA (Kementerian Perdagangan RI, 2024).

Tabel 4 berikut merangkum kapasitas dan aktivitas ITPC Dubai dalam menjalankan fungsi diplomasi ekonomi pasca-CEPA, yang sekaligus mencerminkan keterbatasan institusional yang relevan untuk evaluasi efektivitasnya.

Tabel 4. Kapasitas dan Aktivitas ITPC Dubai dalam Diplomasi Ekonomi Indonesia

Aspek	Temuan	Implikasi
Fungsi utama	Promosi perdagangan dan fasilitasi ekspor Indonesia di kawasan Teluk	Berperan sebagai <i>institutional intermediary</i> antara negara dan pelaku usaha
Aktivitas utama	Pameran dagang, <i>business matching</i> , promosi ekspor, fasilitasi UMKM	Mengurangi <i>information asymmetry</i> bagi eksportir Indonesia
Contoh kegiatan	Partisipasi pada Automechanika Dubai 2024	Memperluas eksposur produk manufaktur Indonesia di pasar UEA

Aspek	Temuan	Implikasi
Potensi transaksi teridentifikasi	±US\$4,4 juta (dari satu kegiatan pameran)	Mengindikasikan kontribusi nyata terhadap ekspor nonmigas
Jangkauan kegiatan	>1.000 pengunjung internasional	Memperlihatkan perluasan jaringan dagang Indonesia di UEA
Relokasi kantor	Port Saeed, Deira (sejak Oktober 2021)	Meningkatkan institutional visibility di hub logistik dan regulasi UEA
Keterbatasan kelembagaan	Data SDM dan anggaran operasional belum tersedia secara terbuka	Membatasi evaluasi empiris komprehensif atas efektivitas institusional ITPC

Sumber: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2024); Kementerian Perdagangan RI – Automechanika Dubai (2024); ITPC Dubai (2024); Yanti (2023).

Tabel 4 memperlihatkan bahwa ITPC Dubai menjalankan fungsi-fungsi yang secara teoritis konsisten dengan peran penghubung dari fasilitator informasi melalui pameran dan *business matching*, hingga pembangunan reputasi produk Indonesia melalui mekanisme penghargaan seperti *Primaduta Award* kepada importir UEA seperti Bafleh Jewellery (Katadata, 2024). Strategi *relational commitment* ini, dalam perspektif Pigman (2010), merupakan instrumen *commercial diplomacy* yang dirancang untuk mengonversi akses pasar formal menjadi hubungan dagang yang berkelanjutan-melampaui fungsi administratif konvensional. Potensi transaksi sebesar ±US\$4,4 juta yang teridentifikasi dari partisipasi pada Automechanika Dubai 2024 memberikan gambaran konkret mengenai nilai ekonomis yang dihasilkan dari aktivitas promosi tunggal, meskipun angka ini perlu dikontekstualisasikan sebagai estimasi potensi dan bukan realisasi ekspor.

Aktivasi mekanisme *mutual recognition* sertifikasi halal dalam CEPA turut menempatkan ITPC pada posisi fungsional baru sebagai *compliance facilitator*: menyediakan pelatihan mengenai *rules of origin*, sosialisasi persyaratan sertifikasi halal UEA, dan intermediasi dengan pembeli potensial-suatu bentuk pengurangan *information asymmetry* yang langsung dirasakan eksportir UMKM (Yanti, 2023). Relokasi kantor ITPC ke kawasan Port Saeed, Deira, sejak Oktober 2021 memperkuat dimensi ini dengan meningkatkan *institutional visibility* di lokasi yang berdekatan dengan hub regulasi dan logistik UEA—sebuah sinyal komitmen jangka panjang yang relevan bagi mitra bisnis UEA (Kementerian Perdagangan RI, 2024).

2.2 Keterbatasan Kapasitas dan Evaluasi Kritis

Evaluasi yang komprehensif terhadap peran ITPC Dubai menuntut pengakuan terhadap keterbatasan kapasitas institusional yang bersifat struktural. Meskipun ITPC berhasil mengintensifkan kegiatan promosi pasca-CEPA, kapasitasnya dalam hal sumber daya manusia dan anggaran operasional tidak terdokumentasi secara terbuka-suatu kondisi yang secara langsung membatasi kemampuan akademik untuk mengevaluasi efektivitasnya secara empiris. Dalam kondisi permintaan layanan yang meningkat pasca-aktivasi CEPA, keterbatasan kapasitas ini berpotensi membatasi efektivitas implementasi di mana UMKM yang paling membutuhkan pendampingan justru tidak mendapatkan layanan yang memadai, sementara manfaat CEPA lebih banyak dinikmati oleh perusahaan yang sudah memiliki kapasitas ekspor independen. Kesenjangan distribusi manfaat semacam ini merupakan dimensi yang perlu mendapat perhatian dalam evaluasi kebijakan diplomasi ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

3. Institusionalisasi Investasi Strategis Melalui Kemitraan Sovereign Wealth Fund UEA–INA

Kemitraan antara *Indonesia Investment Authority* (INA) dengan Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) dan DP World merepresentasikan dimensi paling kompleks sekaligus paling strategis dari diplomasi ekonomi Indonesia–UEA dalam periode 2019–2024. Berbeda dari IUAE-CEPA yang bersifat perjanjian antarpemerintah, kemitraan *sovereign wealth fund* (SWF) ini beroperasi melalui mekanisme konsorsium ekuitas yang melibatkan aktor negara dan korporasi dalam struktur kelembagaan yang terintegrasi. Dari perspektif Keohane (1984), skema ini mencerminkan *complex interdependence* dalam praktik: ketergantungan mutual yang terstruktur melalui kepemilikan ekuitas bersama, di mana kedua pihak terikat secara kontraktual untuk memelihara keberlanjutan kerja sama demi melindungi nilai investasi masing-masing.

3.1 Struktur Kemitraan dan Mekanisme Credible Commitment

Konsorsium INA–DP World untuk pengembangan *Belawan New Container Terminal* (BNCT) di Sumatera Utara-yang melibatkan PT Prima Terminal Petikemas (PTP/Pelindo) sebagai mitra domestik-mengoperasionalkan prinsip kepemilikan bersama untuk memperkuat komitmen jangka panjang antar mitra. Ketika investor asing menanamkan ekuitas dalam infrastruktur domestik melalui konsorsium dengan pemegang saham lokal, mereka tidak hanya menyuntikkan modal tetapi juga menempatkan reputasi institusional sebagai jaminan keseriusan (Baqi, 2022). Penandatanganan *shareholder agreement* antara Pelindo, konsorsium INA–DP World, dan PTP pada Juni 2023 menciptakan *exit cost* yang signifikan bagi semua pihak, sehingga secara struktural meningkatkan stabilitas kerja sama dan mengurangi risiko terminasi prematur yang lazim menghambat proyek infrastruktur skala besar. Partisipasi ADIA-melalui anak usahanya-dalam platform investasi jalan tol Trans-Jawa bersama INA dan APG Asset Management (Belanda) pada awal 2024 menambahkan dimensi *multilateral institutional oversight* yang memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset (INA, 2024).

Struktur kemitraan INA dengan mitra SWF UEA, beserta status komitmen investasi yang dibedakan secara eksplisit, dapat dilihat pada Tabel 5 berikut. Perbedaan antara nilai *pledged*, *committed*, dan *realized* dalam tabel ini penting untuk menghindari *overclaim* yang kerap menjadi kelemahan dalam analisis diplomasi investasi bilateral.

Tabel 5. Struktur Kemitraan INA dengan Mitra SWF UEA

Proyek	Entitas UEA	Mitra Lain	Nilai Investasi	Kategori Komitmen	Status (2024)
Belawan New Container Terminal (BNCT)	DP World	INA, PTP/Pelindo	Pipeline: hingga US\$7,5 miliar	Pledged / Pipeline	Shareholder agreement Juni 2023; pengembangan berlanjut
Platform Investasi Tol Trans-Jawa	ADIA (anak usaha)	INA, APG (Belanda)	Seed assets: US\$2,75 miliar	Committed Capital	Operasional; ADIA & APG resmi bergabung awal 2024

Proyek	Entitas UEA	Mitra Lain	Nilai Investasi	Kategori Komitmen	Status (2024)
Ruas Tol Kanci-Pejagan & Pejagan-Pemalang	ADIA	INA	Termasuk dalam platform tol	Committed / Realized	Aktif; skema konsesi 15–30 tahun
Energi Terbarukan melalui Danantara	ADIA	Danantara SWF	Sinyal komitmen: hingga US\$10 miliar	Contingent / Pledged	Pipeline; belum terdapat perjanjian formal yang mengikat

Sumber: *Indonesia Investment Authority (2024); Baqi (2022); Kementerian BUMN RI. Catatan: Nilai 'hingga US\$7,5 miliar' (BNCT) dan 'hingga US\$10 miliar' (Danantara) merupakan angka pipeline/pledged maksimum-bukan realisasi investasi. Perbedaan kategori komitmen mencerminkan tingkat keterikatan hukum yang berbeda dari masing-masing skema.*

Tabel 5 mengonfirmasi bahwa kemitraan INA dengan SWF UEA beroperasi dalam berbagai derajat keterikatan institusional yang berbeda. Platform investasi tol Trans-Jawa dengan nilai seed assets US\$2,75 miliar merupakan yang paling maju secara institusional karena telah memasuki tahap *committed capital* dengan partisipasi aktif ADIA dan APG, serta beroperasi di bawah skema konsesi 15–30 tahun yang membantu meningkatkan kepastian jangka panjang bagi investor dan eksportir (*temporal credibility*), komitmen yang secara struktural melampaui siklus pemerintahan dan memaksa kedua pihak membangun mekanisme adaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi-politik (Keohane, 1984). Di sisi lain, komitmen ADIA terhadap Danantara senilai hingga US\$10 miliar masih berstatus *contingent/pledged* tanpa perjanjian formal yang mengikat secara hukum, sehingga harus diperlakukan dengan kehati-hatian analitis yang tinggi dan tidak dapat disetarakan dengan realisasi investasi dalam argumentasi akademik.

3.2 Logika Institusional Jangka Panjang

Model kemitraan yang diterapkan dalam seluruh proyek INA–SWF UEA secara konsisten menghindari struktur transaksional jangka pendek. Platform investasi tol Trans-Jawa, sebagai contoh, didahului oleh Nota Kesepahaman pada 2021, diikuti proses *due diligence* yang ekstensif, dan baru dioperasionalkan secara penuh pada awal 2024—sebuah sekuens institusional yang memakan waktu namun mencerminkan komitmen terhadap proses yang terstruktur dan transparan (INA, 2024). Proyek BNCT pun dimulai dengan penandatanganan *shareholder agreement* setelah negosiasi panjang antara Pelindo, INA, dan DP World. Pola ini konsisten dengan logika *institutional lock-in* dalam kerangka Keohane (1984): setiap tahap formalisasi yang berhasil diselesaikan meningkatkan biaya keluar dari kerangka kerja sama, sehingga probabilitas defeksi berkurang secara kumulatif.

Meski demikian, terdapat risiko institusional yang tidak dapat diabaikan. Ketergantungan pada SWF sebagai mitra investasi strategis utama menciptakan eksposur terhadap perubahan prioritas portofolio SWF—yang dapat dipengaruhi oleh dinamika harga minyak global, rotasi aset, atau pergeseran orientasi geopolitik kawasan Teluk. Kapasitas INA sendiri sebagai *platform manager* dalam mengelola proyek-proyek multi-pihak berskala besar secara simultan juga merupakan dimensi *institutional capacity risk* yang relevan untuk dipantau dalam jangka menengah. Total realisasi FDI Indonesia pada 2024 tercatat mencapai US\$55,3 miliar (Reuters, 2025), namun isolasi kontribusi spesifik kemitraan SWF UEA dari total tersebut memerlukan data sektoral-asal yang lebih terperinci dari BKPM.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Uni Emirat Arab (UEA) pada periode 2019–2024 berkembang ke arah penguatan institusional melalui integrasi instrumen perdagangan, promosi ekspor, dan investasi strategis. IUAE-CEPA berfungsi sebagai kerangka formal yang memperkuat koordinasi dan liberalisasi perdagangan bilateral, sementara ITPC Dubai berperan sebagai fasilitator implementasi yang menghubungkan komitmen perjanjian dengan aktivitas perdagangan konkret. Di sisi lain, kemitraan antara Indonesia Investment Authority (INA) dan institusi investasi UEA menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi juga dijalankan melalui pembentukan kerja sama investasi jangka panjang di sektor infrastruktur strategis. Temuan ini mengindikasikan bahwa hubungan ekonomi Indonesia–UEA tidak lagi semata berorientasi pada transaksi jangka pendek, tetapi bergerak menuju pola kerja sama yang lebih terstruktur dan berkelanjutan melalui penguatan kelembagaan bilateral.

Dalam perspektif institusionalisme neoliberal, penguatan institusi tersebut memperlihatkan pentingnya mekanisme formal dalam menciptakan stabilitas kerja sama ekonomi internasional. Kehadiran perjanjian perdagangan, lembaga promosi dagang, dan skema investasi bersama berkontribusi dalam memperkuat koordinasi, meningkatkan kepastian kerja sama, serta memperluas keterlibatan aktor negara dan non-negara dalam diplomasi ekonomi. Dengan demikian, diplomasi ekonomi Indonesia terhadap UEA pada periode kajian dapat dipahami sebagai proses institusionalisasi kerja sama yang bertujuan menjaga keberlanjutan hubungan bilateral di tengah dinamika ekonomi global.

Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan empiris. Data perdagangan pasca-implementasi IUAE-CEPA masih relatif terbatas sehingga dampak jangka menengah perjanjian belum dapat dievaluasi secara menyeluruh. Selain itu, efektivitas mekanisme Joint Committee belum sepenuhnya dapat dianalisis karena keterbatasan dokumentasi publik mengenai implementasinya. Pada sektor investasi, sebagian komitmen kerja sama yang diumumkan juga masih berada pada tahap perencanaan atau komitmen awal sehingga realisasi investasi jangka panjang memerlukan pengamatan lebih lanjut.

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan evaluasi yang lebih longitudinal terhadap implementasi IUAE-CEPA, khususnya terkait efektivitas mekanisme kelembagaan dan realisasi investasi pasca-perjanjian. Dari sisi praktis, penguatan koordinasi antarlembaga, optimalisasi fungsi ITPC Dubai, serta peningkatan transparansi implementasi kerja sama investasi perlu terus dilakukan agar proses institusionalisasi diplomasi ekonomi Indonesia–UEA dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih konsisten dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Abu Dhabi Investment Authority. (2024, November 14). *ADIA annual report 2023 released. Ours Abroad News*. <https://are.news.o-abroad.com/Abu%20Dhabi/economy/95445-en-abu-dhabi-investment-authority-releases-annual-report-303.html>
- Baqi, A. M. (2022). Komitmen investasi Uni Emirat Arab (UEA) pada Indonesia Investment Authority (INA) 2021. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(1), 11–30. <https://doi.org/10.38156/jisp.v2i1.126>
- Bayne, N., & Woolcock, S. (2011). *The new economic diplomacy: Decision-making and negotiation in international economic relations* (3rd ed.). Routledge.
- Budiman, I., Abdurrahman, B., & Aradea, M. F. A. (2024). The role of the Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) and investment in Indonesia's economic diplomacy. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 14(2). <https://ejournal.brin.go.id/jissh/article/view/12899> (Ejournal BRIN)
- Emirates News Agency. (2023, November 13). *UAE–Indonesia trade sees substantial increase following introduction of CEPA. WAM*. <https://www.wam.ae/en/details/1395303212812>

- Indraini, A. (2023, September 3). *IUAE CEPA berlaku, begini dampaknya ke perdagangan RI*. *Detikfinance*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6911388/iuae-cepa-berlaku-begini-dampaknya-ke-perdagangan-ri>
- Institute of Policy Research Islamabad. (2023). *Pakistan's economic diplomacy: Challenges and way forward*. IPRI Publications. <https://ipripak.org/wp-content/uploads/2023/03/Pakistans-Economic-Diplomacy.pdf>
- Keohane, R. O. (2022). Neoliberal institutionalism: Resolving the uncertainty problem. *International Organization*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8841398/>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023). *Dokumen ratifikasi Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2023 tentang IUAE-CEPA*. Kementerian Luar Negeri RI. <https://kemlu.go.id/files/repositori/65413/LKj%20Dit.%20HPE%20TA%202023.pdf>
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2022). *Proses perundingan IUAE-CEPA Indonesia–Uni Emirat Arab*. <https://ditjenppi.kemendag.go.id/berita/perundingan-indonesia-uae-cepa-capai-kesepakatan-substansi>
- Minhajuddin, & Santika. (2023). Kepentingan Uni Emirat Arab dalam kerja sama ekonomi dengan Indonesia (IUAE-CEPA): Telaah konstruktivisme. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO*, 3(2), 123–132. <https://doi.org/10.31605/lino.v3i2.3052> (Online Journal Systems Unsulbar)
- Ministry of Economy (UAE). (2022). *UAE–Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA): Factsheet*. https://www.moet.gov.ae/en/cepa_indonesia
- Riyandanu, M. F. (2024, July 15). *Deret komitmen investasi UEA di Indonesia kala Jokowi ke Abu Dhabi*. *Katadata*. <https://katadata.co.id/berita/nasional/6695ab0994eac/deret-komitmen-investasi-uea-di-indonesia-kala-jokowi-ke-abu-dhabi>
- Santoso, R. B., & Moenardy, D. F. (2023). Indonesia's economic diplomacy in Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA). *Indonesian Journal of International Relations*, 7(2), 272–291. <https://doi.org/10.32787/ijir.v7i2.456> (IJIR)
- Skare, M., Soriano, D. R., & Porada-Rochoń, M. (2020). Impact of COVID-19 on economic growth: Evidence from OECD countries. *Technological Forecasting and Social Change*, 160, 120336. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120336>
- United Nations Conference on Trade and Development. (2022). *World investment report 2022: International tax reforms and sustainable investment*. UNCTAD. <https://unctad.org/publication/world-investment-report-2022>
- Wa'Uina, O. J., Nau, N. U. W., & Seba, R. O. C. (2024). Kepentingan ekonomi Indonesia melalui perjanjian Indonesia–Uni Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA). *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(8). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i8.2900> (Laaroiba Journal)
- Widi Yanti, W. (2023). Dinamika diplomasi ekonomi Indonesia dalam kerjasama bilateral dengan Uni Emirat Arab tahun 2021–2023. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 2(1). https://www.researchgate.net/publication/376617270_DINAMIKA_DIPLOMASI_EKONOMI_INDONESIA_DALAM_KERJASAMA_BILATERAL_DENGAN_UNI_EMIRAT_ARAB_TAHUN_2021-2023
- Wulandari, S. (2022). Dampak perdagangan internasional dalam perekonomian Indonesia. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 2(1), 148–160. <https://doi.org/10.38156/jisp.v2i1.126>